



**IMPLEMENTASI PERBUB PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA
CAMAT DALAM PEMBANGUNAN SARANA / PRASARANA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KENDAL**

TESIS

Disusun Oleh :

**MADE AGTYA KUSUMAYUDHA
191003631010355**

**PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN



IMPLEMENTASI PERBUB PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA CAMAT DALAM PEMBANGUNAN SARANA / PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KENDAL

MADE AGTYA KUSUMAYUDHA
191003631010355

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister
Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui oleh Pembimbing dan
Ketua Program Studi pada tanggal seperti tertera dibawah ini

Semarang, 15 Maret 2021

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. Indra Kertati, M.Si
NIDN. 0601086401

Menyetujui,

Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik

Dr. Tri Lestari Hadlari, M.Si
NIDN. 0618066501

LEMBAR PENGESAHAN



IMPLEMENTASI PERBUB PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA CAMAT DALAM PEMBANGUNAN SARANA / PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KENDAL

MADE AGTYA KUSUMAYUDHA
191003631010355

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister
Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui Tim Penguji dan disahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Semarang, 15 Maret 2021

1. Dr. Indra Kertati, M.Si
Ketua Tim Penguji/Pembimbing
2. Dr. Munawar Noor, MS
Penguji 1


.....

.....

Mengesahkan,
Dekan FISIP UNTAG Semarang

Dr. Rini Werdiningsih, MS
NIDN: 0621105901

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teknis, kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat termasuk pada kategorikan tidak sulit untuk diimplementasikan. Salah satu faktor pendukungnya adalah tingkat kemajemukan masyarakat kecamatan Kendal tergolong rendah sehingga relatif mudah dalam mengimplementasikan kebijakan. Proporsi kelompok sasaran sudah sesuai dengan total populasi namun belum seluruhnya. Dalam implementasi kebijakan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan belum tampak signifikan. Dalam proses implementasi tampak bahwa isi kebijakan sudah cukup jelas. Kebijakan pelimpahan wewenang mempunyai dukungan teoritis yang kuat. Besarnya alokasi sumberdaya finansial pada pembangunan sarana dan prasarana di kecamatan Kendal pada umumnya sudah sesuai kebutuhan hanya saja belum semua terpenuhi. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ketersediaan dana juga masih belum mencukupi untuk setiap kebutuhan kegiatan. Dukungan antar instansi masih kurang karena sumber daya manusia yang kurang mencukupi secara kuantitas. Implementasi pelimpahan wewenang aturan cukup jelas namun konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana belum berjalan sesuai aturan. Tingkat komitmen aparat cukup bagus.